



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR-RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA)

Tahun Sidang : 2005-2006
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Senin, 19 Juni 2006
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Pimpinan Rapat : Drs. Theo L. Sambuaga
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR-RI
Acara : 1. Kata Pengantar oleh Ketua Rapat
2. Penjelasan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir : 42 orang Anggota dari 49 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Menteri Komunikasi dan Informatika, DR. Sofyan A. Djalil, S.H., MA., MALD. beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2006 dengan waktu dan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Theo L. Sambuaga dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo untuk melanjutkan dan meningkatkan pertemuan dengan KPI dengan jadwal kerja dan timeline yang diharapkan dalam tempo 3 (tiga) bulan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat antara Pemerintah dan KPI tentang Peraturan Pemerintah tentang Penyiaran, dan memperbaiki PP Penyiaran untuk mengakhiri dualisme kebijakan yang membingungkan industri dan masyarakat penyiaran serta kepastian penegakan peraturan di lapangan.

2. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan KPI dalam penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan penyiaran oleh lembaga penyiaran.

3. Mengingat pentingnya telekomunikasi bagi kemajuan perekonomian dan keamanan negara, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melaksanakan program Kewajiban Pelayanan Universal (USO) sesuai dengan perencanaan dan target waktu, jumlah desa, dan juga sesuai dengan anggaran yang sudah dialokasikan, dengan memprioritaskan daerah-daerah tertinggal yang secara komersial tidak berpotensi mendapat layanan telepon.
4. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk membuat kebijakan yang memanfaatkan secara optimal teknologi informasi, dan kompetisi yang sehat, yang dapat mendorong peningkatan produksi, dan meminimalkan tarif biaya telepon, serta menguntungkan pelayanan masyarakat.
5. Dalam rangka mempercepat teledensitas di Indonesia dan membuka peluang yang sama bagi partisipasi dan berkembangnya operator dengan kompetisi yang sehat, Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk memberikan kemudahan akses interkoneksi dengan harga yang murah, serta berlaku adil dengan menindak operator yang menghambat interkoneksi, serta memberikan kesempatan bagi operator telekomunikasi lain untuk penyelenggaraan jaringan tetap.
6. Komisi I DPR RI minta Pemerintah untuk membuat regulasi yang tidak membolehkan disiarkannya program SMS premium yang bernuansa judi, bersifat menipu, dan membodohkan masyarakat umum, serta mengawasi pelaksanaannya.
7. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk dapat memasyarakatkan IGOS dan *Open Source Software* sebagai salah satu alternatif piranti lunak yang dapat terjangkau oleh masyarakat Indonesia dan tidak terpaku pada piranti lunak yang berlisensi, untuk menghindari pembajakan piranti lunak.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

KETUA RAPAT

THEO L. SAMBUAGA
A- 525